

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 9 Kab. Tangerang
Kelas / Semester	: X /1
Tema	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Sub Tema	: Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembelajaran ke	: 1 /Pertama
Alokasi Waktu	: 2 x 45 Menit (4 pertemuan)

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.4 Menghormati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	2.4. Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar	2.4.1 Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat

	Negara Republik Indonesia Tahun 1945	dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3	3.4. Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>3.4.1 Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.4.2 Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah</p> <p>3.4.3. Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah</p>
4	4.4 Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>4.4.1 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4.4.2. Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat membangun nilai-nilai responsif dan proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.
4. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah
5. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menunjukkan

- hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
6. Setelah memperoleh informasi materi pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menaji dan mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Materi Pembelajaran

1. Desentralisasi
2. Otonomi Daerah
3. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
4. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

Metode Pembelajaran

Pendekatan : Pendekatan ilmiah (*scientific approach*)

Model : *Discovery Learning*

- Metode : 1. Ceramah Plus
2. Curah Pendapat
3. Pemecahan Masalah
4. Diskusi

Media dan Sumber Belajar

1. Media
 - a. Laptop
 - b. LCD Projector
2. Sumber Belajar
 - a. Buku Ajar Fokus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan X Kurikulum 2013, CV. Sindunata.
 - b. Referensi lain yang relevan
 - c. Internet

B. Kegiatan Pembelajaran

Langkah Langkah Pembelajaran

Pertemuan Kesatu / pertama (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media serta buku yang diperlukan. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual dan sosial peserta didik. 4. Guru menyampaikan tujuan materi “Desentralisasi atau Otonomi daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 	10 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum peserta didik memahami desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru dapat menunjukkan ilustrasi/paparan/ wacana tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi 	70 menit

	<p>daerah. Guru dapat memulai pelajaran dengan mengemukakan hakikat desentralisasi dan kelebihan serta kekurangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta didik disajikan wacana tentang tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah. 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca wacana tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah. 4. Peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan tentang wacana tersebut (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 5. Peserta didik mengumpulkan informasi dari buku teks atau sumber lain yang relevan melalui media cetak/elektronik hal yang berkaitan dengan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Peserta didik membuat analisis diskusi dalam kelompok tentang desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Peserta didik mengkomunikasikan hasil analisi diskusi dalam kelompok tentang desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk komunikasi tulisan. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sebagai umpan balik pembelajaran peserta didik ditugaskan melengkapi Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar 	10 menit

Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi 3. Guru menyampaikan tujuan materi “Otonomi daerah dan Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan”. 4. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi, (kelompok 4 diminta mempersiapkan kelompoknya). 	10 menit

Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi kelompok 4, topik Bab 4, Sub-bab A, pada Sub-bab 2 dan 3. 2. Pada saat kelompok 4 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi yang sedang dijelaskan (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh kelompok 4, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu waktu yang tersedia). 5. Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. 6. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan. 	70 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. 	10 menit

Pertemuan Ketiga (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama 2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik kepada Allah SWT atas nikmat dan keberkahan yang diberikan kepada kita sekalian. 4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 5. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku Bab 4, Sub-Bab B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Sub-Bab C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. 6. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu 	10 menit

	permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh Pemerintah Pusat dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah	
Inti	<p>Mengorganisasi peserta didik untuk belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan antara 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelompok Ganjil (Kelompok 1, 3, 5, dan 7) Analisis tentang permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah pusat ➤ Kelompok Genap (Kelompok 2, 4, dan 6) Analisis tentang permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah daerah 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan 4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan hukum b. Kedudukan dan peran pemerintah pusat/ pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku c. Identifikasi 3 (tiga) permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia d. Solusi terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah <p>Membimbing penyelidikan individual dan kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Landasan hukum b. Kedudukan dan peran pemerintah pusat/ pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku c. Identifikasi 3 (tiga) Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia d. Solusi terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala permasalahan atau 	70 menit

	<p>kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah tersebut</p> <p>3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan</p> <p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> <p>1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok</p> <p>2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (<i>powerpoint</i>) atau laporan tertulis.</p> <p>3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji</p>	
Penutup	<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta proses berlangsungnya tugas kelompok.</p> <p>2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan.</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar</p>	10 menit

Pertemuan Keempat (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	<p>1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama</p> <p>2. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tidak kalah penting aspek sikap spiritual dan sosial peserta didik.</p> <p>3. Guru menyampaikan tujuan materi Bab 4, Sub-bab D “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.</p> <p>4. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembelajaran <i>inquiry</i></p>	10 menit
Inti	<p>1. Sebelum peserta didik memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guru memaparkan tentang</p>	70 menit

	<p>konsep materi tersebut secara general.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks pelajaran PPKn Sub-bab D materi Bab 4 atau materi yang relevan dari sumber lain (seperti website/internet/ media sosial/sumber lainnya). 3. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis dalam kelompok tentang topik materi Bab 4, Sub-bab D “Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. (dalam kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan mengumpulkan informasi terkait pencarian informasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dari sumber lain yang relevan). 4. Perwakilan kelompok (2 s.d 3 orang) menyampaikan hasil analisis diskusi dalam kelompok di hadapan peserta didik dari kelompok lain disertai dengan masukan, sanggahan, pertanyaan dari kelompok lain serta argumentasi kelompok penyaji (menanya). 5. Hasil analisis kelompok dalam bentuk tertulis dikumpulkan kepada guru. 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan diskusi kelompok. 2. Sebagai refleksi, peserta didik dapat mengambil manfaat dari pembelajaran Bab 4 “Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah”. 3. Sebagai umpan balik, peserta didik diminta untuk melengkapi Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar 	10 menit

A. Penilaian Hasil Pembelajaran.

No.	Kompetensi	Teknik	Instrumen	Keterangan
1.	KI 1 dan KI 2	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar observasi 	Terlampir
2.	KI 3	Tes tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Pilihan ganda • Uraian • Tugas (mandiri atau kelompok) 	Terlampir
3.	KI 4	Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar laporan tugas 	Terlampir

B. Remidi dan Pengayaan

Remidi

Pembelajaran remedial dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik yang memiliki capaian kompetensi di bawah yang diharapkan

- b. Pembelajaran remedial dalam pembelajaran PPKn dilaksanakan untuk kelompok peserta didik di antaranya yang memiliki hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perhatian yang sangat kurang dan mudah terganggu dengan sesuatu yang lain disekitarnya pada saat belajar.
 - 2) Secara relatif lemah kemampuan memahami secara menyeluruh.
 - 3) Kurang dalam hal memotivasi diri dalam belajar.
 - 4) Kurang dalam hal kepercayaan diri dan rendah harapan dirinya.

Pembelajaran remedial dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%.
- b. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%.
- c. Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20 % tetapi kurang dari 50%.
- d. Pemanfaatan tutor teman sebaya

Sekolah : SMKN 9 Kab. Tangerang

Kelas : X ...

Materi pokok :

No	Nama Siswa	Nilai		Nilai Akhir
		Sebelum Remedial	Remidi	

Pengayaan

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimilikinya sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik.

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 1. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

Sekolah : SMK Negeri 9 Kab. Tangerang

Kelas : X ...

Materi pokok :

No	Nama Siswa	Nilai	
		Sebelum Pengayaan	Nilai Akhir

Lampiran

Penilaian KI 1 (Penilaian Sikap Sepiritual)

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL (LEMBAR OBSERVASI)

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa *Lembar Observasi*. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrument yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Pada jenjang SMA/MA, kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI-1: *Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya*.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian

Secara periodik, misalnya 1 atau 2 minggu sekali guru melakukan penilaian sikap spiritual peserta didik. Caranya, guru memberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut.

- 4 = *selalu*, apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan.
 3 = *sering*, apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya.
 2 = *kadang-kadang*, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukannya.
 1 = *tidak pernah*, apabila peserta didik tidak pernah melakukannya.

NO	Aspek Pengamatan	Skor
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu	
2	Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan	
3	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi	
4	Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan	
5	Melaksanakan ibadah keseharian baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sesuai dengan agama yang dianutnya	
Jumlah Skor		

C. Lembar Observasi

Kelas :
 Semester :
 TahunAjaran :
 Periode Pengamatan : Tanggal ... s.d.

No.	Nama Peserta Didik	Aspek Pengamatan					Jumlah	Rerata Skor	Nilai	Keterangan
		1	2	3	4	5				

1										
2										
3										

Penilaian KI 2 (Penilaian Sikap Sosial)

**INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL
(LEMBAR OBSERVASI)**

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa *Lembar Observasi*. Sikap sosial yang dikembangkan pada Kompetensi Inti 2 di jenjang SMA/MA meliputi:
 - a. jujur
 - b. kreatif
 - c. disiplin
 - d. tanggung jawab
 - e. toleransi
 - f. gotong royong
 - g. santun
 - h. responsif
 - i. pro aktif
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Pengisian

Secara periodik, misalnya 1 atau 2 minggu sekali guru melakukan penilaian sikap sosial peserta didik. Caranya, guru memberi tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap sosial yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut.

4 = *selalu*, apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan.

3 = *sering*, apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya.

2 = *kadang-kadang*, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukannya.

1 = *tidak pernah*, apabila peserta didik tidak pernah melakukannya.

Guna memudahkan penilaian, guru dapat membaca indikator tiap-tiap aspek sosial sebagai berikut.

Tabel Daftar Deskripsi Indikator

Sikap dan Pengertian	Contoh Indikator
<p>1. Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ ulangan • Tidak menjadi plagiat (mengambil/ menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) • Mengungkapkan perasaan apa adanya • Menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan • Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya • Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki

Sikap dan Pengertian	Contoh Indikator
<p>2. Kreatif Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan ide/karya inovatif yang dipublikasikan/dipasarkan. • Menghasilkan ide/karya inovatif untuk kalangan sendiri/ skala kecil. • Memodifikasi dan menggabungkan beberapa ide/karya untuk menghasilkan gagasan/karya baru. • Mencoba membuat ide/karya dari contoh yang sudah ada.
<p>3. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Datang tepat waktu • Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/ sekolah • Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan • Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar
<p>4. Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas individu dengan baik • Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan • Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat • Mengembalikan barang yang dipinjam • Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan • Menepati janji • Tidak menyalahkan orang lain utk kesalahan tindakan kita sendiri • Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh/diminta
<p>5. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat • Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya • Dapat menerima kekurangan orang lain • Dapat mememaafkan kesalahan orang lain • Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan • Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain • Kesiediaan untuk belajar dari (terbuka terhadap) keyakinan dan gagasan orang lain agar dapat memahami orang lain lebih baik

Sikap dan Pengertian	Contoh Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima sesuatu yang baru
<p>6. Gotongroyong adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah • Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan • Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan • Aktif dalam kerja kelompok • Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok • Tidak mendahulukan kepentingan pribadi • Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan orang lain • Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama
<p>7. Santun adalah sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat <u>relatif</u>, artinya yang dianggap baik/santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati orang yang lebih tua. • Tidak berkata-kata <u>kotor</u>, <u>kasar</u>, dan <u>takabur</u>. • Tidak meludah di sembarang tempat. • Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat • Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain • Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) • Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain • Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan
<p>8. Responsif Adalah kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dan pemahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggap terhadap kerepotan pihak lain dan segera memberikan solusi dan atau pertolongan • Berperan aktif terhadap berbagai kegiatan sekolah dan/atau sosial • Bergerak cepat dalam melaksanakan tugas/kegiatan • Berfikir lebih maju terhadap segala hal
<p>9. Proaktif Adalah sikap seseorang yang mampu membuat pilihan dikala mendapatkan <i>stimulus</i>. Seseorang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berinisiatif dalam bertindak terkait dengan tugas/pekerjaan atau social • Mampu memanfaatkan peluang yang ada

Sikap dan Pengertian	Contoh Indikator
yang bersikap proaktif mampu memberi jeda antara datangnya stimulus dengan keputusan untuk memberi respon. Pada saat jeda tersebut seseorang yang proaktif dapat membuat pilihan dan mengambil respon yang dipandang terbaik bagi dirinya.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki motivasi untuk terus maju dan berkembang Fokus pada hal-hal yang memungkinkan untuk diubah atau diperbaiki

C. Lembar Observasi

Kelas :
 Semester :
 Tahun Ajaran :
 Periode Pengamatan : Tanggal ... s.d.

No	Nama Peserta Didik	Sikap Sosial								Jumlah	Rerata Skor	Nilai	Ket
		Jujur	Kreatif	Disiplin	Tanggung Jawab	Toleransi	Gotong Royong	Santun	Responsif				
1													
2													
3													

Penilaian KI 3 (Penilaian Pengetahuan)

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

- Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh....
 - dipilih oleh partai politik
 - dipilih langsung oleh rakyat
 - pengangkatan kepala daerah
 - dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
 - dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ...
 - peradilan/yustisi,
 - politik luar negeri

- C. kebijakan pendidikan
 - D. pertahanan dan keamanan
 - E. moneter dan fiskal nasional
3. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas....
- A. keterbukaan dan akuntabilitas
 - B. otonomi dan tugas pembantuan
 - C. kepastian hukum dan demokrasi
 - D. pemerataan dan pembagian kekuasaan
 - E. keseimbangan dan pembagian keuntungan
4. Di dalam negaa yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....
- A. federal
 - B. serikat
 - C. monarki
 - D. kesatuan
 - E. negara bagian
5. Perhatikan data berikut :
- (1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
 - (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
 - (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
 - (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
 - (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
- Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
- A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 1 dan 5
 - D. 2 dan 4
 - E. 2 dan 5
6. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....
- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
 - B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
 - C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
 - D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
 - E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012
7. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....

- A. MPR
 - B. DPR
 - C. DPD
 - D. DPRD
 - E. presiden
8. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....
- A. pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
 - B. pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sejajar.
 - C. hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - D. kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
 - E. pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang berbeda.
9. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ...
- A. peradilan/yustisi
 - B. politik luar negeri
 - C. kebijakan pendidikan
 - D. pertahanan dan keamanan
 - E. moneter dan fiskal nasional
10. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas....
- A. otonomi dan tugas pembantuan
 - B. keterbukaan dan akuntabilitas
 - C. kepastian hukum dan demokrasi
 - D. pemerataan dan pembagian kekuasaan
 - E. keseimbangan dan pembagian keuntungan

B. Uraian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi

daerah di Indonesia.

5. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	D
2	C	7	D
3	B	8	C
4	D	9	C
5	E	10	A

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	<p>Negara kesatuan adalah negara dimana segala urusan kenegaraan dan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.</p> <p>Dalam praktiknya desentralisasi pada negara kesatuan Republik Indonesia dibedakan atas 3 (tiga) bagian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Desentralisasi politik</i>, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. <i>Desentralisasi fungsional</i>, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. 3. <i>Desentralisasi kebudayaan</i>, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya. 	3
2	<p>Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	3

	<p>Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.</p> <p>Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing- masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya</p>	
3	<p>Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi,</p> <p>tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki</p> <p>3 (tiga) fungsi.</p> <p>1) Fungsi Layanan (<i>Servicing Function</i>) Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.</p> <p>2) Fungsi Pengaturan (<i>Regulating Function</i>) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan</p>	3

	<p>masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.</p> <p>3) Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.</p>	
4	<p>Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (<i>medebewind</i>) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat</p> <p>Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman asyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penaggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 	3
5	<p>a. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara</p>	4

yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Cara pertama*, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. *Cara kedua*, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah, sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- b. **Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah** Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

	pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.	
--	--	--

Penilaian KI 4 (Penilaian Keterampilan)

Penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik pada presentasi berlangsung, baik sebagai penyaji maupun sebagai peserta yaitu: kemampuan menyajikan hasil pengamatan/ kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah menggunakan format di bawah ini.

Kelas :
 Hari, Tanggal :
 Materi Pokok :

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian			Jml Skor
		Kemampuan menyajikan informasi/ bertanya	Kemampuan menjawab/ berargumentasi	Kemampuan dalam memberikan masukan/saran	
1					
2					
3					

Keterangan : Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang
 Skor Maksimal 12

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jml Skor Perolehan}}{12} \times 100$$

. Mengetahui :
 Kepala SMKN 9 Kab.Tangerang

Tangerang, 22 Juli 2019
 Guru Mata Pelajaran

Ir. SUHARNI, M.Pd
NIP.19650108 200012 2 001

INDA HELINA, S.Pd
NUPTK. 3754765667220002